

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama terdiri dari: (1) latar belakang masalah, (2) permasalahan penelitian, (3) tujuan penelitian, (4) paradigma penelitian, dan (5) manfaat penelitian. Secara berurutan dikemukakan dalam uraian berikut:

A. Latar Belakang Masalah

Tatkala Indonesia dipandang sebagai cikal bakal kekuatan baru dalam percaturan dunia dengan menempatkan teknologi sebagai dasar pembangunan, akhirnya sirna manakala sejak penghujung masa pemerintahan orde baru badai krisis melanda bangsa dan ternyata bukan semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi. Ada faktor lain yang turut mempengaruhi semua itu, seperti kepercayaan semakin menipis yang justru merambah sampai pada lapisan kehidupan masyarakat atau pelaku pemerintahan paling bawah. Dampak yang dirasakan bagi pegawai pemerintah di tanah air – terutama di kalangan birokrat – adalah hujan serta pekik nada-nada yang tidak sedap didengar telinga, kendati yang berbuat tidak sesuai tuntutan dan harapan masyarakat hanya di kalangan terbatas.

Sulit dipungkiri bahwa keberadaan seseorang dalam sebuah tatanan organisasi sebagai suatu sistem, mau tidak mau akan mempengaruhi pola dan perilaku bersangkutan. Kendati paradigma ini bertolak belakang dengan keinginan publik atau pihak yang “*concern*” terhadap kebenaran hakiki, namun

pada masa yang sama mereka akan selalu terabaikan, bahkan terasing dalam organisasi dan dunia mereka sendiri. Mengapa perlu demikian? Padahal di negara raksasa seperti di Amerika Serikat, David Osborn dan Ted Gaebler (1999) yang mengutip tulisan George Latimer, mantan Walikota St. Paul berkata tentang sistem dalam tuturan sederhana yaitu: "semakin tua saya semakin yakin bahwa agar benar-benar berjalan semua program harus dimiliki oleh masyarakat yang akan dilayani. Ini bukan sekedar retorika melainkan kenyataan. Jadi, harus ada kepemilikan".

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam sistem kehidupan ini yang menempatkan secara bersama posisi pemerintah sebagai kekuatan sebagai pendayung, tidak semata-mata menjadi berhasil dari hasil dayungannya, tetapi juga menempatkan masyarakat sebagai komponen sistem yang diberikan tanggung jawab tertentu sehingga mereka mempunyai rasa memiliki dari apa yang akan dikerjakan secara bersama tersebut. Kiranya pandangan ini harus diterjemahkan lebih luas dalam melihat manusia agar tunduk kepada sistem. Idealnya, manusia sebagai komponen terpenting dalam gugus sistem harus berupaya bagaimana sistem dijadikan komoditi percepatan pencapaian tujuan, bukan larut dalam sistem, apalagi hanya berpihak pada keuntungan semu dan kelompok tertentu.

Tidak kalah pentingnya ketika M. Fernandez Ferez (1982) berkata bahwa suatu sistem yang dirancang bagi sebagian kecil di zaman kemajuan ini, sementara pengetahuan hanya berubah dengan perlahan-lahan dan orang dapat



berharap untuk mempelajari semua yang diperlukan bagi kehidupan intelek dan profesinya dalam beberapa tahun dengan cepat menjadi ketinggalan ketika pendidikan diperluas menjadi pendidikan untuk masa dan ruang lingkup pengetahuan meningkat semakin cepat selama waktu perubahan.

Barangkali di sini letaknya bahwa perubahan dan pergeseran pola kehidupan dapat terjadi bilamana seseorang atau kelompok yang lebih besar sepakat melakukan *reinventing* bagi tatanan kehidupan, namun perubahan tersebut dalam koridor integritas yang mengutamakan kepentingan nilai-nilai bersama. Artinya perubahan dilakukan tatkala nilai-nilai kehidupan yang hakiki menjadi bagian terpisahkan dengan menata kembali nilai-nilai dalam sistem politik, sosial, budaya, ekonomi bahkan sistem tata pemerintahan suatu negara harus diletakkan pada proporsi sebenarnya.

Tidak berlebihan dalam upaya memahami kondisi ini, pendidikan menawarkan diri sebagai solusi yang paling tepat dengan menempatkan manusia sebagai komponen terdepan. Pendidikan dimaksud adalah pendidikan yang diselenggarakan secara profesional yang mengutamakan aspek-aspek kualitas, keadilan dan pemerataan. Diakui sulit mewujudkan pendidikan seperti yang diharapkan, terbukti selalu menjadi bahan konsumsi dalam seminar-seminar atau pertemuan formal lainnya. Pendidikan yang diharapkan ini harus dilihat dari berbagai aspek kepentingan, sehingga setiap masalah mendapat porsi untuk diperbaiki dan dikembangkan atau bahkan dijadikan peluang kebijakan dalam inovasi pada era yang akan datang.

Semua masyarakat sepakat membutuhkan dan mendambakan pendidikan profesional. Pertanyaan yang segera timbul dan melintas dalam pikiran kita adalah bagaimana pendidikan profesional diselenggarakan? untuk siapa? dan siapa yang semestinya bertanggung-jawab secara teknis operasional? Indonesia sejak beberapa dekade menyatakan perang terhadap buta huruf seiring dengan kebijakan mempertinggi tingkat pendidikan masyarakat. Kebijakan mulia yang sangat manusiawi dan edukatif diformulasikan dalam program-program yang relevan. Kendati program buta huruf diarahkan agar peserta didik yang memiliki usia dewasa - usia tua, menikah, terutama di pedesaan - yang sangat rentan terhadap menularnya penyakit kebodohan. Beberapa tahun berselang, muncul kebijakan baru secara simultan merupakan terobosan yang diprakarsai secara bersama oleh pemerintah di negara-negara Asia untuk melaksanakan kewajiban belajar bagi semua anak di Sekolah Dasar mulai tahun 1980. Lebih lanjut dikenal dengan sebutan "Rencana Karachi". Di Indonesia dinamakan Program Wajib Belajar Sekolah Dasar yang juga diaplikasikan dalam pendidikan sederajat melalui Departemen terkait dan atau dalam pendidikan luar sekolah. Tatkala Program Wajib Belajar mendapat respon positif dari masyarakat, pemerintah kembali melanjutkan sampai tingkat SLTP atau Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

Program Wajib Belajar yang dilaksanakan melalui satuan pendidikan, terutama di lembaga pendidikan formal mendapat perhatian serius dari pemerintah dengan menyediakan dana relatif besar, fasilitas sampai ke pelosok

tanah air, sehingga sulit membedakan antara SD Inpres dan SD Non Inpres. Pada awal kebijakan ini harus diacungkan jempol manakala lapisan masyarakat bawah dapat “mengenyam” pendidikan sebagai konsekuensi lokasi sekolah berdekatan dengan tempat tinggal. Mengingat pada sisi lain kebutuhan berkembang, terutama gencarnya tuntutan untuk mengejar kualitas, kebijakan pembangunan gedung dalam jumlah relatif besar menjadi persoalan baru. Masalah kekurangan guru tetap saja menjadi agenda klasik, persoalan efisiensi mengedepan sejalan dengan tuntutan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang profesional. Anak usia sekolah masih saja belum tertampung atau pada saat yang sama juga terlihat keengganan bersekolah, angka tinggal kelas dan putus sekolah tetap saja menjadi bagian integral dalam catatan kelas menyebabkan pengambil kebijakan harus “memutar otak” untuk menemukan solusi terbaik dalam mengatasi persoalan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada bagian yang berbeda peran masyarakat diperlukan dalam pendidikan. Futuristik dan rekayasa menuju era global harus dijadikan tatanan dunia baru justru mengalami kejayaan apabila dilapisi kekuatan dari suatu sistem. Sistem pendidikan yang kokoh dan menyentuh kepentingan semua merupakan jaminan kekuatan suatu negara dalam menghadapi tantangan globalisasi. Bukan itu saja, dalam lingkup yang lebih sederhana, kekuatan baru ini dapat mengatasi persoalan *urgens* di sekeliling kelas sebagai organisasi paling kecil dalam ruang lingkup organisasi pendidikan.

Dalam pandangan makro disadari bahwa permasalahan kelas relatif ringan dan dalam posisi paling kecil, namun pada sisi lain bila masalah-masalah kelas saja tidak dapat diatasi secara baik apalagi sampai menggerogoti kepentingan murid sebagai subjek pendidikan, maka akan memiliki dampak keberhasilan pendidikan secara komprehensif. Dalam UU No. 2 Tahun 1989, ditegaskan bahwa peserta didik mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. Upaya tersebut dimiliki peserta didik melalui kegiatan belajar setiap saat dalam perjalanan hidup serta mendapatkan bantuan fasilitas sesuai persyaratan yang berlaku. Selaras dengan tuntutan hak ini, kepada peserta didik juga dikenakan kewajiban untuk menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, mematuhi peraturan dan menghormati guru serta memelihara fasilitas belajar yang ada di setiap kelas.

Dalam Undang-undang di atas, posisi murid sebagai peserta didik menjadi dominan, baik dalam jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Fokus perhatian di sini terarah pada sekolah sebagai satuan pendidikan yang mengenal sistem administrasi yang relatif baik dari jalur pendidikan lainnya. Semua anak yang masuk dalam sistem pendidikan sekolah melalui pendaftaran dan secara otomatis menjadi tanggung jawab sekolah. Tanggung jawab yang amat berat bukan menjaga, mengajar murid dalam kurun waktu 7 jam sehari, melainkan bagaimana mereka mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat setelah memperoleh berbagai nilai dari sekolah.

Jika dihubungkan dalam fakta keseharian apa yang terjadi sesungguhnya tentang murid di Sekolah Dasar, tidak perlu menutup mata karena masih banyak masalah yang mengganggu pelaksanaan kegiatan pendidikan secara efektif, terutama dalam koridor kualitas, keadilan dan pemerataan. Fenomena yang dapat diketengahkan berdasarkan prasurvey pada beberapa sekolah (SD) di Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat antara lain:

- (1) terdapat 18.519 anak usia sekolah 7-12 tahun yang belum tertampung di Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau dipersentasekan sebesar 9,13%. Angka ini sangat mempengaruhi terhadap kesuksesan pelaksanaan program wajib belajar di kabupaten penghasil minyak bumi tersebut;
- (2) hingga saat ini terdapat kekurangan guru Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 1.304 orang, atau sebesar 16,03%. Angka tersebut relatif besar, apalagi dihubungkan dengan keberadaan mereka sebagai tenaga pengajar profesional, sementara formasi pengangkatan relatif terbatas sebagai konsekuensi keuangan negara terbatas. Tentunya sangat bertolak belakang apabila masalah ketenagaan ini – khusus gaji guru – dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten;
- (3) ketersediaan buku ajar dan buku penunjang di sekolah-sekolah tertentu atau di kecamatan dengan radius jarak tempuh jauh dari kota kabupaten sangat terbatas. Buku pelajaran yang digunakan murid yang sesuai dengan uraian materi pelajaran berdasarkan kurikulum terbaru dirasakan sangat kurang. Fenomena ini diprediksi sebagai status ekonomi orang tua yang relatif



rendah serta perhatian terhadap pendidikan anak masih perlu ditingkatkan, terutama dalam rangka menyukseskan peorgram wajib belajar;

- (4) masih ada sebagian dikalangan guru Sekolah Dasar yang belum melaksanakan disiplin kelas secara baik sesuai dengan tata tertib yang disepakati sekolah. Sebagai konsekuensi dari kenyataan ini masih terlihat anak-anak yang sering terlambat datang (masuk) sekolah atupun “bolos” pada jam-jam tertentu. Dari pengamatan sementara yang dilakukan beberapa minggu diketahui bahwa ada murid Sekolah Dasar tertentu yang terkesan kurang disiplin dipredikasi berasal dari lemahnya kepemimpinan guru kelas di sana;
- (5) angka tinggal kelas masih besar. Dari data Kantor Depertemen Pendidikan Nasional Kabupaten Indramayu diperoleh informasi bahwa terdapat 2.654 murid Sekolah Dasar yang dinyatakan tinggal kelas pada tahun pelajaran 2000/2001 atau sebesar 1,24%. Jumlah yang relatif besar ini harus dilihat sebagai fenomena menarik untuk dianalisis guna menemukan akar pemasalahannya dan selanjutnya diberikan solusi yang efektif;
- (6) demikian halnya angka putus sekolah masih dikategorikan besar bila dibanding kondisi masyarakat di zaman modern yang merasa “malu” bila tidak bersekolah. Dari catatan kantor yang sama diperoleh informasi bahwa terdapat sejumlah 638 murid putus sekolah. Dipredikasi banyak faktor penyebab mereka memilih putus sekolah, termasuk informasi menurut

penuturan lugu beberapa orang tua sebagai budaya turun temurun “kawin muda”.

Menyikapi fenomena pendidikan di atas, ada sejumlah kasus yang dialami murid Sekolah Dasar Kecamatan tertentu di Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat dan apabila diabaikan pasti berbuntut pada semakin jauhnya pencapaian tuntutan kualitas Sumber Daya Manusia setempat. Demikian juga, bila kondisi itu terus berlanjut tidak salah bila dikatakan bahwa masa depan kabupaten ini – rakyat di sana – hanya sebagai penonton di negeri sendiri, terutama dalam menyukseskan program pemerintah mengeksplorasi minyak bumi sebagai sumber yang potensial penyumbang dana daerah di Propinsi Jawa Barat. Fenomena itu harus dilihat sebagai embrio masalah besar di masa yang akan datang dan harus diterjemahkan oleh semua pihak-pihak berkepentingan secara arif dan bijaksana dengan menempatkan posisi murid sebagai sasaran utama.

Bila sepakat menempatkan sumber permasalahan besar di masa depan adalah keterabaian pelayanan pendidikan bagi setiap murid dari pengembangan potensi kecerdasan pada masa kini, mau tidak mau solusi yang efektif harus dilakukan dengan kebijakan holistik serta harus menyentuh kepentingan murid secara langsung. Kondisi yang tidak diinginkan bersama tentunya sikap arogansi generasi tua yang selalu mengabaikan kebijakan mencerdaskan kehidupan bangsa ini dan akan menjadikan bangsa ini hanya sebuah negara bodoh dan

dimungkinkan menjadi terkotak-kotak, terpecah belah dan tidak dapat disangkal penjajah kembali mengeruk hasil bangsa. Demikian dahsyatnya dampak kelalaian tenaga pendidik dan orang tua dalam memberikan dorongan untuk belajar dan melaksanakan pendidikan di bangku persekolahan, maka pengambil kebijakan di kabupaten ini harus melakukan kegiatan faktual dan menemukan strategi pemecahan bagaimana caranya mengatasi masalah putus sekolah atau tinggal kelas yang efektif sesuai permasalahan setiap kecamatan, terutama kecamatan-kecamatan yang dikategorikan sangat prihatin.

Bila dihubungkan antara fenomena di atas dengan kondisi Kabupaten Indramayu yang terdiri atas 22 kecamatan, 8 kelurahan serta 310 desa memiliki jumlah penduduk relatif besar yakni 1.561.679 jiwa sebenarnya pada batas-batas tertentu karena masih banyak di antara putra daerah yang memiliki pola pikir maju ke depan bahkan bertaraf internasional untuk dapat diberdayakan dalam rangka menjawab kebutuhan setempat, sehingga "*image*" pejabat pusat tentang rendahnya kualitas dapat dihentikan atau setidaknya dapat diminimalkan pada titik yang paling rendah.

Demikian besar tuntutan daerah, sementara permasalahan kecil di lingkungan kelas saja masih banyak yang belum tuntas diselesaikan secara bijaksana, apalagi terkesan adanya sikap yang belum memberdayakan potensi (putra daerah) sebagai mitra dalam mengatasi persoalan pendidikan di Sekolah Dasar merupakan peluang yang menarik hati untuk diteliti serta diungkapkan

secara baik dan jelimet sehingga ditemukan faktor penyebab permasalahan itu terjadi, terutama berkaitan dengan masalah yang sangat prinsip yakni tinggal kelas dan putus sekolah bagi murid-murid Sekolah Dasar di Kabupaten Indramayu.

Mengingat masalah tinggal kelas dan putus sekolah merupakan bagian penting dalam sistem kualitas pendidikan, maka untuk kepentingan studi ini akan dilihat dari kacamata Administrasi Pendidikan, sesuai dengan program studi yang ditekuni saat ini pada Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

B. Permasalahan Penelitian

Dalam menempuh pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan SLTP tentunya tidak semua anak beruntung dan dapat bersekolah secara lancar. Kondisi itu terjadi disebabkan berbagai faktor, seperti mengalami tinggal kelas lalu mengulang kelas dan sebagian di antara mereka ada pula yang putus sekolah baik disebabkan tinggal kelas atau penyebab aturan sekolah dan masalah ekonomi keluarga yang pada gilirannya mengalami frustrasi serta merasa malu.

Tinggal kelas dan putus sekolah merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh siapa saja, termasuk murid itu sendiri yang pada dasarnya merasa kecewa, malu dan rendah diri. Konsekuensi lain yang ditimbulkan dari fenomena ini adalah biaya besar yang harus ditanggung oleh orang tua bahkan

pihak sekolah. Yang jelas, anak tinggal kelas kemudian mengulang kelas akan mengurangi daya tampung sekolah. Artinya pada sisi lain mereka merugikan anak-anak lain untuk memperoleh layanan pendidikan yang baik.

Berdasarkan pernyataan di atas, guna memfokuskan studi pada dua agenda tersebut akan dirumuskan masalah penelitian yang berbunyi sebagai berikut:

Apakah efisien manajemen sistem pendidikan yang dilaksanakan Pihak Pengelola setempat dalam mengatasi murid mengulang kelas dan putus sekolah di Sekolah Dasar Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat?

Oleh karena masalah yang dirumuskan di atas masih bersifat umum, maka dipandang perlu untuk memformulasikan dalam penjabaran yang lebih khusus seperti dua pokok masalah meliputi:

1. Bagaimana masalah mengulang kelas bisa terjadi bagi murid Sekolah Dasar di Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat?
 - 1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan murid-murid di Sekolah Dasar Kabupaten Indramayu mengalami tinggal kelas (mengulang kelas)?
 - 2) Bagaimana kinerja manajemen guru kelas dalam mengatasi masalah mengulang kelas yang dilakukan saat mengajar di kelas atau pada kesempatan yang berbeda?
 - 3) Bagaimana kinerja manajemen Kepala Sekolah sebagai pimpinan organisasi dalam rangka mengatasi masalah mengulang kelas bagi murid-murid tersebut?

- 4) Bagaimana pula solusi yang dilakukan oleh masyarakat, baik melalui Pengurus BP3 maupun pihak orang tua sebagai mitra sekolah dalam rangka mengatasi masalah mengulang kelas?
2. Mengapa putus sekolah bisa terjadi bagi murid-murid di Sekolah Dasar Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat? Masalah ini akan dijawab melalui pertanyaan berikut:
- 1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan murid Sekolah Dasar di Kabupaten Indramayu mengalami putus sekolah?
 - 2) Bagaimana kinerja manajemen guru kelas dalam mengatasi masalah putus sekolah yang dilakukan di kelas atau pada kesempatan yang berbeda?
 - 3) Bagaimana efisiensi kualitas kinerja manajemen Kepala Sekolah sebagai pimpinan organisasi sekolah dalam mengatasi masalah putus sekolah?
 - 4) Solusi apa yang dilakukan oleh masyarakat, baik melalui Pengurus BP3 maupun pihak orang tua sebagai mitra sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang baik sehubungan dengan penanggulangan masalah putus sekolah di Sekolah Dasar tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian adalah mendapatkan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kondisi murid, guru, kepala sekolah serta masyarakat

yang terlibat dalam permasalahan mengulang kelas dan putus sekolah di Sekolah Dasar Kabupaten Indramayu. Gambaran yang dimaksud merupakan kondisi nyata yang dialami sekolah bersangkutan sehingga akan ditemukan makna tertentu ataupun nilai-nilai keunggulan dalam praktek dan teoretik terhadap upaya mencari faktor-faktor penyebab melalui implementasi manajemen yang efisien dilakukan oleh pihak sekolah dan masyarakat.

Dengan penelitian yang diarahkan kepada dua agenda penting ini akan tergambar secara menyeluruh tentang kualitas sekolah, karena kegagalan pihak-pihak berkepentingan di sekolah mengatasi berbagai persoalan murid - mengulang kelas dan putus sekolah - akan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan sekolah. Diasumsikan bahwa keberhasilan sekolah yang paling dominan ditentukan oleh keberhasilan murid sekolah setempat, seperti lulus tepat waktu dengan catatan utama adalah angka mengulang kelas dan putus sekolah mendekati titik nol.

Di samping itu, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan, mengevaluasi dan menafsirkan temuan penelitian tentang masalah tinggal kelas bagi murid Sekolah Dasar di Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat;
 - 1) Faktor-faktor yang menyebabkan murid di Sekolah Dasar Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat yang mengalami tinggal kelas atau mengulang kelas;

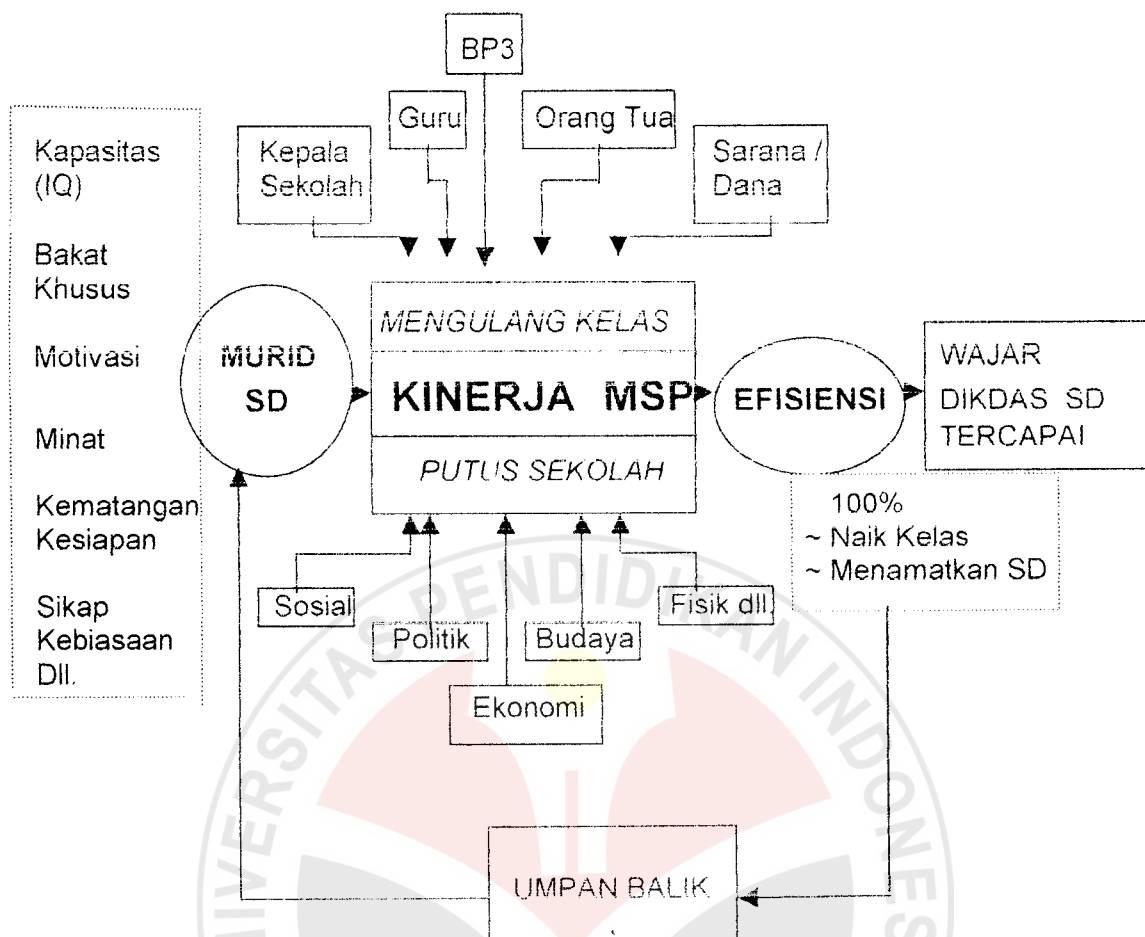
- 2) Efisiensi kinerja manajemen guru kelas sekolah dasar dalam mengatasi masalah mengulang kelas pada saat KBM berlangsung atau dalam situasi lainnya;
 - 3) Efisiensi kinerja manajemen Kepala Sekolah sebagai pimpinan organisasi dalam rangka mengatasi masalah tinggal kelas;
 - 4) Efisiensi solusi yang dilakukan oleh masyarakat, baik melalui Pengurus BP3 maupun pihak orang tua sebagai mitra sekolah dalam mengatasi masalah tinggal kelas;
2. Mendeskripsikan, mengevaluasi dan menafsirkan masalah putus sekolah murid-murid Sekolah Dasar di Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat;
- 1) Faktor-faktor yang menyebabkan murid Sekolah Dasar di Kabupaten Indramayu mengalami putus sekolah;
 - 2) Efisiensi kinerja manajemen guru kelas dalam mengatasi masalah putus sekolah baik dalam antisipasi maupun mengajak anak-anak tersebut kembali bersekolah;
 - 3) Efisiensi kinerja manajemen Kepala Sekolah sebagai pimpinan organisasi Sekolah Dasar di Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat dalam rangka mengatasi masalah putus sekolah;
 - 4) Efisiensi solusi masyarakat setempat, baik melalui Pengurus BP3 maupun pihak orang tua sebagai mitra sekolah dalam menanggulangi masalah putus sekolah di Sekolah Dasar.

D. Paradigma Penelitian dan Premis

Tinggal kelas dan putus sekolah dipandang sangat merugikan anak bersangkutan, orang tua dan pemerintah. Di akui bahwa setiap anak akan merasa kecewa apabila tinggal kelas dan anak-anak tertentu akan mengulang kembali untuk berupaya dapat belajar sesuai dengan harapan yakni naik kelas. Akan tetapi, tidak semua anak yang tinggal kelas selanjutnya mengulang kelas dan apabila atau tekanan tertentu, termasuk rasa malu menyebabkan mereka mengambil keputusan untuk berhenti bersekolah.

Anak tinggal kelas dan putus sekolah di tingkat Sekolah Dasar sangat mengganggu pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar, apabila tidak ditangani secara serius akan menjadi beban bagi pemerintah yang juga akan berdampak pada persoalan ketenagakerjaan, ekonomi bahkan membuka peluang untuk berkembangnya penyakit sosial, seperti tawuran, narkoba, kenakalan yang mengganggu ketertiban umum atau degradasi moral dengan mencuri dan tindakan sejenisnya.

Berkaitan dengan persoalan tinggal kelas dan putus sekolah, secara sistemik akan dikemukakan paradigma penelitian sebagai kerangka dasar studi ini seperti ditampilkan dalam gambar pada halaman selanjutnya.



Gambar -1
Paradigma Penelitian

tepat, juga dibutuhkan Kinerja Manajemen Sistem Pendidikan yang efisien dengan menemukan faktor penyebab dan memberikan solusi yang efektif, maka pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar akan tercapai. Artinya pencapaian program wajar terwujud yang ditandai dengan semua murid naik kelas, dan tidak seorangpun yang keluar sekolah (putus sekolah). Kelemahan dan keunggulan dapat diketahui melalui studi ini sehingga diharapkan dapat memberikan umpan balik dalam mengatasi masalah tersebut di masa yang akan datang.

Sementara itu, ada sejumlah premis yang dijadikan landasan penelitian ini sebagai berikut:

- (1) kegiatan manajemen akan bermuara pada produktivitas. Sedangkan secara komprehensif manajemen dalam sistem pendidikan akan bermuara pada produktivitas sekolah sebagai bentuk identifikasi keberhasilan dan kegagalan. Sekolah yang produktif itu ditandai optimalisasi fungsi administratif, fungsi psikologi dan fungsi ekonomi (Alan Thomas, 1971).
- (2) sedangkan optimalisasi fungsi administratif, fungsi psikologi dan fungsi ekonomi ditandai efisiensi tertentu. Manajemen sistem pendidikan yang efisien dilihat dari rendahnya mengulang kelas dan putus sekolah (Ace Suryadi, 1999). Kondisi mengulang kelas dan putus sekolah justru disebabkan masalah pribadi murid (internal) dan masalah luar diri (eksternal) yang membutuhkan penanganan serius agar setiap murid tetap bersekolah (Mohd. Surya, 2000).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini, secara teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan informasi pembuatan kebijakan dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar.

Selanjutnya, penelitian ini memberikan manfaat dalam upaya mengetahui perbedaan sumber-sumber penyebab terjadinya masalah tinggal kelas dan putus sekolah serta solusi yang dilakukan oleh setiap pihak-pihak berkompeten baik secara individu maupun kelembagaan. Informasi ini bermanfaat dalam meneliti faktor-faktor lain yang berpengaruh secara langsung terhadap masalah tersebut.

Sedangkan secara praktis memberikan manfaat yang tidak ternilai manakala dijadikan bahan pertimbangan bagi guru, kepala sekolah, pengurus BP3 setempat serta tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki "*concern*" terhadap pendidikan dalam kebijakan meminimalkan derajat tinggal kelas dan putus sekolah di Sekolah Dasar.

Mengingat studi yang dilakukan ini terbatas dalam satu kabupaten bahkan tidak semua kecamatan disoroti, maka peluang penelitian yang sama dalam aspek dan wilayah tertentu sangat terbuka lebar. Seyogyanya penelitian tersebut mengarah kepada studi komparatif dengan membandingkan hasil temuan setiap kabupaten di Propinsi Jawa Barat.

